



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4 Jakarta 10710 – Indonesia
Telepon.3500901; Fax. 3521967

**NOTULEN SOSIALISASI LAPORAN EITI 2014 DAN
FGD RENCANA PEMBENTUKAN EITI DAERAH**

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Juli 2017
Waktu : 08:30 – 12.00 WIB
Tempat : Hotel Mercure, Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Peserta Rapat : 1. Kemenko Perekonomian: Agus Haryanto
2. Sekretariat EITI: Edi Tedjakusuma, Agus Trianto, Doni Erlangga, Anggi Gartika, Astari Maharani
3. Setda Prov Kalsel: Siti Wakidah, Yelita
4. Bapeda Prov Kalsel: Syahrul, Sofya Rizky, Ismi Rahman, Rina, Dodi Santosa.
5. BPPRD Kab Kotabaru: Hairul, Said Fadliyani, Gusti Y.
6. BPPRD Tanah Baru: Andrianto W, Laili F
7. Setda Tabalong: Faizal R
8. Bapenda Tanah Laut: Surya A, Aberiansyah
9. BPPRD Tapin: Mukhadi, Sukadim
10. Bapeda Banjar: Sukanto, Kasrul Anwar, Yurida, Zainal, Andre
11. BPPRD Banjar Baru: Laili Faridah
12. Universitas Lambung Mangkurat: Adip Mustofa, Eko R,
13. T Adaro: Dinda Sekar

A. PEMBUKAAN DAN SAMBUTAN

1. Sambutan oleh Kabid Industri Ekstraktif Minerba mewakili Asisten Deputi Industri Ekstraktif Kemenko Perekonomian.

Bpk Agus Haryanto mewakili Asisten Deputi Industri Ekstraktif, Bpk Ahmad Bastian Halim membuka rapat dan menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan EITI di Indonesia, sekretariat EITI Indonesia dalam penyusunan Laporan EITI yang sudah bisa terpenuhi 100 % sampel dari perusahaan migas, namun dari perusahaan minerba belum bisa memenuhi sampel 100 %. Saat

ini baru mencakup sekitar 80-85 % dari penerimaan negara yang telah dilaporkan oleh perusahaan, dengan jumlah perusahaan sekitar 75 – 120 perusahaan yang dikenakan wajib menyampaikan laporan EITI, sehingga masih banyak perusahaan terutama yang mempunyai ijin IUP yang diterbitkan oleh kewenangan pemerintah daerah, kurang lebih ada sekitar 10.500 IUP.

Berdasarkan masukan dan saran serta rekomendasi dari anggota tim pelaksana dan untuk lebih menjangkau pelaksanaan transparansi industri ekstraktif di daerah maka di usulkan untuk membentuk EITI daerah, sehingga transparansi atas perusahaan yang belum bisa terjangkau oleh sekretariat EITI Indonesia, bisa dijangkau pelaksanaannya oleh EITI Daerah. Diharapkan EITI daerah dapat memberikan dampak positif untuk perbaikan tata kelola ditingkat daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat di daerah tersebut.

2. Sambutan oleh Kabid Pertambangan Umum mewakili Kepala Dinas ESDM Prov Kalimantan Selatan

Bpk Bambang Tri menyampaikan bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam sektor migas dan minerba telah dieksploitasi untuk kesejahteraan masyarakat. Namun kenyataannya masih banyak masyarakat di sekitar tambang yang masih miskin. Hal itu juga terjadi karena ketidakpedulian pada lingkungan. Prov Kalsel selalu berkomitmen dalam menjaga lingkungan dengan akan mencabut ijin beberapa IUP yang tak CNC. Pemprov kalsel juga akan menuntut dana jaminan reklamasi baik dari pemerintah kabupaten atau perusahaan sebagai pemegang IUP guna memulihkan kawasan pasca tambang. Tahap pertama Pemprov Kalsel akan menutup sekitar 50 IUP yang non CNC. Untuk mengatasi carut marut bisnis pertambangan di Kalsel, Pemprov telah mewajibkan pembayaran royalti, perusahaan belum bisa mengirimkan barang apabila belum melunasi kewajibannya. Hal itu untuk meningkatkan penerimaan negara. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang, pemilik ijin tambang harus berperan dalam pemberdayaan masyarakat. Atas nama Pemprov kalsel semoga acara FGD dapat berjalan dengan baik dan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan tata kelola pertambangan.

B. PEMAPARAN

1. Laporan EITI Tahun 2014

Disampaikan oleh Revenue Specialist, Bpk Agus Triyanto dari Sekretariat EITI.

- EITI (*Extractive Industries Transparency Initiative*) atau Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif adalah standar global yang bertujuan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pada sektor Industri Ekstraktif (minyak bumi, gas bumi, mineral dan batubara) dan untuk pencegahan korupsi dan peningkatan tata kelola pemerintahan (*good governance*) di bidang pengelolaan sumber daya alam ekstraktif, khususnya minyak bumi, gas bumi, mineral dan batubara.

- Laporan EITI terdiri dari Laporan kontekstual dan rekonsiliasi. Laporan kontekstual membahas perkembangan kegiatan EITI Indonesia khususnya terkait informasi kontekstual yang tersedia pada tahun 2014 terhadap *The EITI Standards 2016*.
- Laporan kontekstual terdiri dari latar belakang dan dasar hukum pembentukan EITI Indonesia, Tata Kelola Industri Ekstraktif di Indonesia, Proses Perizinan, Penetapan Wilayah Kerja Migas Minerba dan Sistem Kontrak, Tentang Pengelolaan Industri Ekstraktif di Indonesia, Pengelolaan Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Tentang Tanggung Jawab Lingkungan Hidup dan Tanggung Jawab Sosial,
- Entitas pelapor laporan EITI 2014 yaitu: 9 instansi pemerintah, 72 operator Migas, 104 non operator Migas, 120 perusahaan Minerba

2. Rencana Pembentukan EITI Daerah.

Disampaikan oleh Team Leader Sekretariat EITI, Bpk Edi Tedjakusuma dari Sekretariat EITI.

- EITI (*Extractive Industries Transparency Initiatives*) adalah standar global untuk mempromosikan keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan SDA, khususnya minyak, gas dan mineral
- Tujuan utama EITI adalah untuk memperkuat sistim pemerintahan dan perusahaan, dengan mendorong terjadinya diskusi publik, pengertian dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan IE. Di setiap negara pelaksana, EITI didukung oleh koalisi antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat sipil (CSO).
- Dalam pelaksanaannya, ditetapkan EITI Standard sebagai panduan kerja bagi negara-negara pelaksana. Saat ini berlaku EITI Standard 2016 yang mewajibkan negara-negara anggota pelaksana EITI untuk menyampaikan Laporan Tahunan
- Manfaat laporan EITI yaitu: Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan industri ekstraktif, Memastikan penerimaan negara dari industri ekstraktif (proses rekonsiliasi), Perbaikan tata kelola (governance), Mendukung upaya keberlanjutan pembangunan
- Pemerintah Daerah yang terlibat langsung dalam kegiatan EITI (sesuai Perpres 26/2010) baru 3 provinsi: Riau, Kaltim dan Jatim
- Tingkat partisipasi perusahaan industri ekstraktif, khususnya minerba selama ini belum optimal (lihat tabel). Perusahaan yang diwajibkan menyampaikan laporan hanya berjumlah sekitar 100-120 perusahaan pembayar royalti terbesar, sementara itu lebih dari 10.000 lainnya belum diwajibkan (karena kapasitas pemantauan yang terbatas)
- Akses untuk mendapatkan informasi kepada perusahaan sering kali cukup sulit bagi Sekretariat EITI
- Pemda sulit mendapat akses data/informasi terkait industri ekstraktif bagi keperluan perencanaannya
- Tujuan pelaksanaan EITI Daerah yaitu : Meningkatkan kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam upaya transparansi penerimaan negara dari industri ekstraktif, Memfasilitasi pemda untuk mendapatkan data dan informasi terkait industri ekstraktif yang ada di daerahnya masing-masing sehingga dapat digunakan oleh pemda dalam perencanaan program di daerah, Mendorong transparansi tata kelola industri ekstraktif di daerah dan di tingkat nasional.

- Ruang Lingkup pelaksanaan EITI daerah yaitu: Menyusun data dan informasi terkait perusahaan industri ekstraktif yang **di bawah kriteria *materiality threshold*** di masing-masing wilayah, Membantu perolehan data dan informasi perusahaan2 yg wajib melapor (di atas kriteria *materiality threshold*) tetapi belum tercatat dalam laporan EITI, Melengkapi informasi terkait tata kelola industri ekstraktif yg tidak terekam dalam laporan EITI, khususnya yg berlaku di wilayah masing2 (kontribusi langsung kpd pemda, CSR, dll), Meningkatkan sinergi pusat daerah dalam transparansi informasi2 industri ekstraktif

C. PEMBAHASAN, TANGGAPAN DAN MASUKAN

Diskusi dipandu oleh moderator Bpk Adip Mustofa dari Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.

1. Bpk Dodi Santosa, Bappeda Prov kalsel : Perusahaan Kalsel yang melaporkan 13 perusahaan yang tidak melaporkan 8 perusahaan. Apa kriterianya dikatakan wajib dan apa ada sanksinya? Untuk permasalahan CSR ada beberapa perusahaan ada yang belum menyampaikan CSR? Kenapa Indonesia baru gabung EITI di tahun 2010?
2. Bpk Surya Arifani, Bappeda Tanah Laut : Hal yang baik ada pelaksanaan EITI. Kita banyak kehilangan data-data dari tambang terutama untuk DBH karena harus direkonsiliasi dengan pusat. Tapi kita tak memiliki data untuk rekonsiliasi. EITI Daerah ada harapan bagi kami. Data-data sudah pindah ke propinsi maka kita berharap dapat data juga terutama tentang DBH. Karena tambang biasanya tak kenal wilayah administrasi karena kadang operasional berada di lintas Kabupaten. Sebuah kegiatan harus ada anggaran? Siapa yang akan mendanai untuk pelaksanaan EITI Daerah?
3. Ibu Siti Wahidah, Sekda Prov Kalsel : Ada 8 perusahaan yang tak melapor, apakah kriteria untuk perusahaan yang melapor? Padahal ada sekitar 700 perusahaan yang terdaftar walaupun masih perlu ditata lagi. Kami sangat mendukung dari kegiatan ini, karena baru tiga provinsi yang saat ini aktif sehingga Kalsel kalau bisa dilibatkan di EITI. Kita juga berharap untuk dapat dengan mudah mendapatkan data karena perusahaan batubara di Kalsel sangat banyak.

Bpk Adip: Catatan bahwa perusahaan di Kalsel bahwa CNC 357 dan Non CNC 303 jadi masih banyak tugas dari pemerintah.

Bpk Edi: terimakasih atas masukan-masukannya. Terkait wajib dan tidak lebih ke akses. Idealnya kita memiliki data dari 10.000 perusahaan tapi ada persyaratan dari EITI Internasional yaitu *materiality threshold* pada perusahaan pada pembayaran royalti. Selain itu juga masalah waktu dan akses. Kita rangking dan kita akumulatif pembayaran royaltinya dari perusahaan. Dari 155 T yang dibayarkan, kita ambil misalkan 85% maka di dapat 120 perusahaan. Kalau dinaikkan lagi *materiality threshold* maka akan semakin banyak.

Persyaratannya diatas 80%. Untuk laporan selanjutnya akan kita naikkan jadi 93% atau 125 perusahaan.

Dasar hukumnya adalah Perpres, makanya tak ada sanksi. Pertanyaannya biasanya kalau tak melaporkan akan dapat sanksi saja. Selalu kita jawab, ini adalah untuk kepentingan bersama, negara dan masyarakat juga untuk akuntabilitas perusahaan. Kita juga akan membahas data-data dan upaya perbaikan tata kelola seperti DBH dimana kita akan mengadakan FGD transparansi DBH.

Laporan terakhir kita agak telat karena anggaran masih dari hibah bank dunia ada kendala administrasi sehingga *Independent Administrator* yang ditunjuk agak terlambat, sehingga kita agak terlambat 2 bulan dari batas waktu pelaporan.

Sanksi tak ada tapi akan dipublish di laporan kita dan media. Akuntabilitas perusahaan penting untuk reputasi perusahaan, terutama perusahaan besar. Kita akan sampaikan ke ESDM Pemda. Kita tak ada sanksi tapi akan coba berikan reward dengan transparansi award.

Kenapa tak dari dulu? Karena inisiatif EITI memang dimulai dari awal 2000an dimana banyak stakeholder yang memperlakukan transparansi terutama tata kelola di negara2 Afrika. Baru tahun 2007 Menkeu Sri Mulyani mendukung Indonesia melaksanakan standar EITI.

Untuk pelaksanaan EITI, Kemenko Perekonomian akan mengalokasikan. Pak Bastian (Asdep Industri Ekstraktif) juga akan mendiskusikan dengan ESDM. Tapi ada baiknya karena penting bagi daerah mungkin bisa dipikirkan peran dari daerah atau bisa juga misalkan dari perusahaan.

Saya coba analisa sedikit data-data tentang royalti dan pembayaran pajak dari tahun 2010-2013. Menunjukkan eksploitasinya yang besar belum tentu pembayar pajak besar dari matrik yang dibuat tak konsisten dengan besarnya eksploitasi dengan besarnya pembayar pajak. Ini harusnya dapat ditindaklanjuti oleh Kemenkeu. Juga untuk mengetahui akuntabilitas harus dilakukan misalkan data ekspor kita dengan negara penerima. Misal ekspor ke Cina apakah data disana juga sama. Jadi pelaksanaan EITI harus ditindaklanjuti tidak hanya berhenti di penyelesaian laporan saja.

Bpk Gunawan Harjito (Dinas ESDM Prov Kalsel): Untuk Ibu Siti sebenarnya dengan adanya UU 23/2014 jadi semua data ada di dinas provinisi. Apabila Bapak tak dapat data, bisa langsung menyurati kami untuk mendapatkan data termasuk royalti, DBH dan rekonsiliasinya dll. Bisa saja langsung datang ke ESDM Provinsi untuk dapat data IUP. Kita ada 640 pemegang IUP. Yang boleh produksi Cuma yang bwestatus CnC yaitu 337 jadi yang belum 303 perusahaan. Kita masih menunggu dari ESDM pusat dari tanggal 31 Januari. Berarti masih ada beberapa yang akan CNC sekitar 45 melalui evaluasi, yaitu perijinan, kewilayahan, dokumen teknis, dokumen lingkungan. Kemudian dibuat rekomendasi dari Gubernur ke Ditjen Minerba. Yang tak CnC nanti akan kita cabut terutama yang ijin IUPnya sudah habis masa berlakunya. Intinya kembali ke Pemerintah karena belum dipercaya maka muncullah adanya seperti EITI ini. Saya serahkan ke Bapak Ibu semua, kalau ada laporan saya berikan. Untuk perbaikan tata kelola saya setuju.

1. Bpk Muhadi BPPR KabTapin. Kami mendukung untuk kroscek data DBH agar lebih akurat. Nanti apakah sudah terbentuk, yang ditampilkan bukan hanya pajak, royalti. Kami usul tampilkan juga masalah Jamrek atau Jaminan Reklamasi karena itu berdampak pada lingkungan.
2. Bpk Hairul Aswandi BPPR Kotabaru: Bagus untuk pelaksanaan EITI Daerah, namun lebih baik dilaksanakan di provinsi saja, namun Kabupaten juga dilibatkan di dalam tim. EITI juga bisa kami gunakan sebagai data pembanding yaitu apabila daerah memiliki upaya rekonsiliasi sendiri.
3. Npk Suryansah Pemkab BanjarBaru: Secara prinsip setuju. Tapi di Perpres 26/2010 hanya pembentukan tim saja jadi harus dibuat dasar hukum yang lebih jelas. Tapi pendapat pribadi saja, apakah ini hanya untuk menunjukkan kalau pekerjaan pemerintah sudah benar saja? Kalau rohnya hanya pembenaran saja pada kinerja pemerintah, saya kurang setuju. Apalagi EITI Daerah hanya untuk kepanjangan tangan untuk pembenaran kinerja saja.

Bpk Edi: Indonesia mulai berinisiatif untuk bergabung dengan EITI di tahun 2007, Perpres ada di tahun 2010. Waktu itu terkait kebutuhan kita misal investasi, karena transparansi terkait dengan iklim. Apabila transparan maka akan meningkatkan iklim investasi. Untuk perusahaan yang besar juga menginginkan akuntabilitas dan reputasi yang mungkin tak berlaku bagi perusahaan-perusahaan kecil. Di negara-negara Afrika banyak yang pembayarannya dikorup, apabila lapor malah *diblacklist*, sehingga harus melakukan bersama-sama. Untuk masalah pembenaran, maka di EITI harus ada MSG yang bergabung yaitu wakil pemerintah, perusahaan, dan CSO. Tiga kelompok tersebut akan saling mengontrol. Yang melakukan rekonsiliasi yaitu *Independent Administrator* yang memiliki reputasi sehingga tak bisa dipengaruhi. Sehingga apabila hasil rekonsiliasi kita bagus dan ada perbedaan lebih karena persoalan administratif di laporan penerimaan negara. Perbedaan rekonsiliasi di Indonesia relatif kecil karena permasalahannya misalkan di volume dll yang EITI belum masuk kesitu.

Perpres hanya terkait beberapa instansi namun isunya lebih ke akuntabilitas dari pihak-pihak yang terlibat.

Data jamrek sudah ada di laporan EITI namun masih belum wajib. Data-data mana yang akan dibuka dan tidak adalah dari MSG. Jadi pemerintah tak bisa sepihak. *Landrent* juga sudah dibuka tapi belum direkon maka diminta untuk direkon di laporan selanjutnya.

D. PEMBAHASAN, TANGGAPAN DAN MASUKAN

1. EITI dibentuk agar kita bisa mendapatkan status *compliance* untuk membangun kesejahteraan di pusat dan daerah
2. Dalam forum ini dipandang pentingnya EITI dibentuk dilihat dari manfaatnya.
3. Untuk dana pendukung diharapkan berasal dari pusat dan daerah

4. Dasar hukum perlu diperkuat karena Perpres dan Permen yang ada baru memayungi EITI Pusat
5. Lingkup laporan EITI dari pusat yang sudah banyak, perlu dikaji di daerah untuk mengetahui mana yang perlu dijadikan lingkup untuk pelaporan tingkat daerah.